

## **Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi**

**Ita Rakhmawati**

IAIN Kudus

[rakmaita@gmail.com](mailto:rakmaita@gmail.com)

### **ABSTRACT**

---

*This study analyzes the effect of accountability and transparency on the effectiveness of BOS fund management with stakeholder participation as a moderating variable. The method used is moderation regression analysis with interaction test. The results showed that accountability has a positive and significant effect on the effectiveness of BOS fund management which is shown by t count equal to 2,701 significance level of 0,01 <0,05. While Transparency have negative and insignificant effect with t arithmetic equal to 1,642 and significance level 0,112 > 0,05. Participation has positive and insignificant effect with t count 0,809 and significance level 0,423 > 0,05. Participation has a negative and significant influence in moderating the relationship between accountability to the effectiveness of the management of BOS funds as indicated by the t count of 2.032 and the significance level of 0.048 <0.05. The participation of positive and significant influence in moderating the transparency relationship on the effectiveness of BOS fund management is shown by the t count for the transparency and participation interaction of 2.045 and the significance level of 0.047 <0.05.*

**Keywords:** *Accountability; Transparency; Participation; Effectiveness of Management*

## ABSTRAK

---

Penelitian Ini Menganalisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Dengan Partisipasi Pemangku Kepentingan Sebagai Variabel Moderasi. Metode Yang Digunakan Adalah Analisis Regresi Moderasi Dengan Uji Interaksi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Akuntabilitas Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Yang Ditunjukkan Oleh T Hitung Sebesar 2,701 Tingkat Signifikansi 0,01 <0,05. Sedangkan Transparansi Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Dengan T Hitung Sebesar 1,642 Dan Tingkat Signifikansi 0,112 > 0,05. Partisipasi Memiliki Pengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Dengan T Hitung 0,809 Dan Tingkat Signifikansi 0,423 > 0,05. Partisipasi Memiliki Pengaruh Negatif Dan Signifikan Dalam Memoderasi Hubungan Antara Akuntabilitas Dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Sebagaimana Ditunjukkan Oleh T Hitung 2,032 Dan Tingkat Signifikansi 0,048 <0,05. Partisipasi Pengaruh Positif Dan Signifikan Dalam Memoderasi Hubungan Transparansi Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Ditunjukkan Oleh T Hitung Untuk Transparansi Dan Partisipasi Interaksi 2,045 Dan Tingkat Signifikansi 0,047 <0,05.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi; Efektivitas Manajemen

## PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen paling utama dalam pembangunan bangsa. Cara terbaik investasi SDM yang berkualitas adalah melalui proses pendidikan yang berkualitas pula. Negara menjamin hak pendidikan bagi tiap warganya, melalui anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Namun, kenyataannya besar anggaran pendidikan tidak sesuai dengan janji pemerintah. Berdasarkan permintaan berbagai pihak seperti PGRI, ISPI, yayasan nurani dunia dan lainnya, MK akhirnya mengabulkan permintaan *judicial review* atas UU NO 13 tahun 2005 tentang APBN yang hanya menetapkan angka 9,1% sebagai batasan tertinggi anggaran pendidikan yang bertentangan dengan amanah UUD 1945.

Munculnya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS- BBM) bidang pendidikan ditujukan untuk mensukseskan program wajib. Pendanaan pendidikan diatur pada UU No. 20 tahun 2003 Bab XIII yang salah satu poinnya adalah pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Keputusan MENPAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004 menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek pembiayaan, waktu, persyaratan,

prosedur, informasi, pejabat berwenang dan tanggungjawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standart dan lokasi pelayanan.

Sekolah sebagai pihak pengelola langsung dana pendidikan, selama ini hanya memiliki dan memberikan laporan dan surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan. Menurut Bastian (2007), sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan kebutuhan biaya pendidikan per siswa. Namun, kenyataan di lapangan masih ditemukan adanya hal berikut:

1. Pada proses pengambilan kebijakan strategis pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah belum melibatkan *stakeholders*, sehingga masih ada pengalokasian anggaran yang tidak mencerminkan prioritas, sifat dan kebutuhan siswa.
2. Makin mahalnya pungutan sekolah sehingga akses orang miskin untuk memperoleh pendidikan menengah yang baik semakin terbatas.
3. Terbatasnya akses komite sekolah terhadap sumber sumber dana yang diperoleh sekolah.
4. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan sekolah belum maksimal untuk bahan pengambilan keputusan entitas sekolah.
5. Kuatnya dominasi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, menyebabkan rendahnya mempertanggungjawabkan keuangan dan melemahkan fungsi pengawasan melalui komite sekolah, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan.
6. Masih adanya berbagai macam persepsi di antara *stakeholders* tentang pengelolaan keuangan sekolah.

Pada perspektif akuntansi, kepala sekolah wajib menyampaikan laporan keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah kepada orang tua murid yang diwakili dengan keberadaan komite sekolah serta kepada pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan (Bastian 2007:29).

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan dari suatu program dapat tercapai sehingga makin besar yang dapat dicapai berarti makin besar tingkat efektivitasnya. Beberapa persoalan yang sering muncul dipermukaan banyak dana BOS yang tidak digunakan sesuai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan dana pendidikan secara transparan dan akuntabel diharapkan mampu memberikan pemahaman sumber pendanaan sekolah yang akan memotivasi partisipasi *stakeholders*. Semakin besar partisipasi *stakeholder* maka akan semakin efektif suatu program terlaksana. Pengelolaan dana BOS yang dilakukan secara tidak transparan dan tidak akuntabel mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan penggunaan dana BOS sehingga tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran. Beberapa kasus indikasi penyalahgunaan banyak di lansir dalam media *on-line* antara lain joglosemar.com bulan Oktober tahun 2013 menyatakan terdapat dugaan penyelewengan dana BOS senilai Rp.100.000.000,00 pada salah satu SMK Negeri di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Masalah lain seperti yang dikutip dari Koran Sindo edisi Sabtu 9 November 2013, orang tua murid merasa sangat

keberatan dengan adanya SPI sebesar Rp. 3,5 juta dan SPP besarnya Rp. 230.000 padahal pada periode yang sama dana BOS untuk siswa tingkat SMA dan sederajat sudah mulai dikucurkan pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas dana BOS dan DPL TA 2007 dan 2008 yang dikutip dari Echwan (2009) terdapat banyak indikasi tentang penyalahgunaan dana BOS antar lain sebagai berikut:

1. Sebanyak 62,85% sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS dan DPL.
2. Sebanyak 4,12% sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah pada peserta didiknya.
3. Dana BOS sebesar Rp 28,14M digunakan tidak sesuai peruntukannya.
4. Buku dana BOS sebesar Rp. 562,4 juta tidak sesuai buku panduan dana BOS dan senilai Rp. 656,7 juta belum / tidak dapat dimanfaatkan.
5. Terjadinya indikasi korupsi sebesar Rp. 2,41 M dana *safeguarding*.

Persoalan sejenis yang diungkap melalui situs resmi pengaduan dana BOS Kemdikbud adanya *double counting*, pembiayaan fiktif, *markup* proyek, penggelapan dan juga penyelewengan dana. Banyaknya kasus yang mengarah pada indikasi korupsi akhirnya BPKP menandatangani opini disclaimer pada laporan keuangan yang dikeluarkan Kemdikbud pada tahun 2011. ([www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)).

Menurut pendapat Febri (Peneliti senior ICW) yang dilansir melalui media republika *on line* tanggal 8 Agustus 2014 penyimpangan dana BOS di tingkat sekolah, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya. Sebagai contoh, kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah ternyata tidak diikuti oleh sebagian besar sekolah.

Penelitian tentang efektifitas pengelolaan dana BOS sudah banyak dilakukan selama ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Modami (2012) menyebutkan pengelolaan dana BOS belum efektif dikarenakan mekanisme pencairan dari pemerintah pusat ke daerah yang begitu panjang memperlambat pencairan sampai di sekolah. Penelitian Erwantosi (2010) menunjukkan pengelolaan program BOS belum efektif sehingga tidak tepat sasaran, kurang akuntabel dan transparansi masih lemah. Berbeda dengan penelitian Kusno (2012) yang menunjukkan pengelolaan dana BOS baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dapat disimpulkan sudah berjalan efektif. Penelitian Pratama (2013) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan dan akuntabilitas publik tidak terdapat hubungan yang positif terhadap efisiensi penyaluran dana BOS. Penelitian Boy (2009) sikap akuntabel dan transparan dalam pengelolaan APBS baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid. Penelitian serupa dilakukan oleh Paulus (2009) menghasilkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya tentang pengelolaan dana BOS SD dan SMP, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada dana BOS SMA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan memasukkan variabel partisipasi *stakeholders* sebagai variabel moderating. Hal ini karena menurut hemat penulis, sangat diperlukan

partisipasi *stakeholders* terutama orang tua siswa dan masyarakat guna mendukung keberhasilan pendidikan. Partisipasi yang besar dapat terjadi jika sekolah dapat memperlihatkan sikap yang lebih transparan, lebih akuntabel dalam mengelola dana BOS yang selama ini telah diterimanya.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai ketepatan sasaran yang dituju. Menurut Mardiasmo (2009: 132) efektivitas merupakan besarnya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*). Suatu tindakan dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan seberapa jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Indriana (2013) juga menjelaskan efektivitas dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input - output yaitu harus mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen berbasis sekolah dan lingkungannya. Sedangkan menurut dimensi waktu efektivitas dapat diamati dalam jangkauan jangka pendek, menengah dan panjang. Kaitannya dengan pendidikan, Thomas dalam Indriana (2013) melihat efektivitas terkait pada tiga dimensi *The administrator production function*, *The psychologist's production function*, *The economic's production function*.

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep manajemen keuangan sekolah pengelolaan dana BOS dapat dikatakan efektif jika penggunaannya tepat pada sasaran dan mampu mencapai *outcomes* yang telah ditetapkan.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978: 77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan,
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap,
4. Perencanaan yang matang,
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja,
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien,
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

### Teori Stakeholder

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*. Semakin *powerful stakeholders*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Dunia Pendidikanpun memerlukan partisipasi dari berbagai *stakeholdersnya* meliputi

birokrasi pendidikan (Dinas Pendidikan), pengawas, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, komite sekolah, dewan sekolah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Aplia (2012) membagi *stakeholder* dalam dunia pendidikan dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu Sekolah, Pemerintah, dan Masyarakat.

## Partisipasi

Partisipasi merupakan hak sekaligus kewajiban seseorang dalam kaitannya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan kelompok. Menurut Krina (2003) partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terkait dengan partisipasi, Wasistiono dalam Haris (2007: 57) memberikan syarat utama agar sebuah aktivitas disebut sebagai bentuk partisipasi jika terdapat unsur rasa kesukarelaan, keterlibatan secara emosional dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatan tersebut. Keterlibatannya partisipasi dibedakan menjadi delapan macam yaitu partisipasi aktif, partisipasi melalui pemberian informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk mendapatkan bantuan, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, swamobilisasi, katalisasi perubahan.

Menurut Dwight W. Allen dalam Rosyada (2007: 20) menjelaskan bahwa sekolah yang demokratis akan memberikan kesempatan keterlibatan masyarakat dalam sekolah yakni sistem pendidikan merupakan refleksi dari keinginan masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi akan memiliki rasa memiliki dan akan responsif dengan berbagai persoalan di sekolah. Partisipasi publik merupakan salah satu pilar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tingkat partisipasi yang diberikan oleh setiap partisipan akan memiliki derajat kekuatan tersendiri. Menurut Arnstein (1969) menyebutkan delapan kategori partisipasi yang dikenal dengan "*Eight rungs on ladder of citizen participation*" yang meliputi: Manipulasi, Terapi, Pemberian informasi, Konsultasi, Penentruman, Kemitraan, Kuasa yang didelegasikan, Kendali warga.

Semakin tinggi tingkat derajat partisipasi menunjukkan semakin besar peran serta masyarakat dalam ikut serta dalam penentuan kebijakan. Menurut Krina (2003) dalam rangka memperkuat partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah:

1. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses publik
2. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan dari *stakeholders* termasuk aktivitas warga dalam kegiatan publik.
3. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan dan layanan publik.

Indikator partisipasi *stakeholders* dalam hal ini komite sekolah mengacu pada UU no 44 tahun 2002 tentang peran dewan pendidikan dan komite sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator antara pemerintah (*executif*) dan masyarakat di satuan pendidikan.

## **Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)**

Peraturan Mendikbud No. 76 tahun 2012 tentang Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS TA 2013 menyebutkan BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing - masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan. Sasaran BOS SMA adalah SMA negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa dengan rincian pada tahap 1 sebanyak 4.072.860 dan 4.235.774 siswa tahap 2 pada tahun anggaran 2013 (Juknis BOS SMA, 2013). Pada tahun 2014 tahap 1 sebanyak 4.270.810 dan 4.497.242 siswa pada tahap 2 (Juknis BOS SMA, 2014). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 tahun 2009 tentang Standart Biaya Operasi Non Personalia tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMP LB, dan SMA LB yang meliputi sebagai berikut:

1. Pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran.
2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
3. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian.
4. Pembelian peralatan pendidikan.
5. Pembelian bahan habis pakai.
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler.
7. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah.
8. Langganan daya dan jasa lainnya
9. Kegiatan penerimaan siswa baru.
10. Penyusunan dan pelaporan.

Program BOS merupakan program yang mendukung penerapan konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yaitu kebebasan untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing - masing sekolah. Pada PP No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, prinsip umum dalam pengelolaan dana pendidikan meliputi prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas publik. Mengacu pada konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) pengelolaan dana BOS mengacu pada prinsip: swakekola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administratif dan pelaporan serta saling percaya

## **Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007). Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang di capai (Krina, 2003). UU No 14 tahun 2008 menjelaskan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang - undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut Krina (2003) prinsip transparansi memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Keterbukaan pihak sekolah terhadap informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak luar diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Keputusan MENPAN No. 26 tahun 2004 tentang Juknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administratif pelayanan, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab, lokasi pelayanan, janji pelayanan, standart pelayanan publik dan informasi pelayanan

Transparansi bertujuan dalam menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Hamid, 2007). Oleh karena itu diperlukan upaya - upaya strategis yang harus dijalankan oleh pihak sekolah guna meningkatkan transparansi publik. Menurut Mahmudi (2010: 18) persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga publik dalam rangka penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan teknologi informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen yang tepat.
2. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai.
3. Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas tersebut.

Menurut Hamid (2007) indikator keberhasilan transparansi sekolah antara lain ditunjukkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan berwibawa
2. Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah
3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah
4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku

### **Akuntabilitas**

Mardiasmo (2009) mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi



tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sumber pendanaan sekolah sebagian besar dari pihak luar yaitu dari pemerintah yang bersumber dari dana APBN/APBD berupa dana bantuan operasional sekolah dan dari pihak luar lainnya terutama orang tua siswa berupa sumbangan pendidikan. Dana dari pihak luar terutama itulah yang oleh pihak sekolah harus mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada sekolah. Menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan

Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi: (a) Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik; (b) Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik; dan (c) Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik. Manajemen sekolah juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, agar meminimalisir bias individual dalam berbagai keputusan serta menjunjung tinggi *collective judgement* yakni keputusan yang diambil bersama sama. Seiring perubahan lingkungan dan tingkat kesadaran berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) menyebabkan tuntutan akuntabilitas menjadi makin besar dan kompleks terutama pada instansi publik.

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Mekanisme akuntabilitas meliputi beberapa aspek yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas, kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan, untuk apa akuntabilitas dilakukan, dan bagaimana akuntabilitas ini dilaksanakan. Mekanisme akuntabilitas ini sangat bergantung pada kondisi dan sistem yang ada pada masing - masing instansi.

Salah satu pelaksanaan akuntabilitas eksternal, sebenarnya pihak sekolah sudah memiliki metode yang efektif dengan terbentuknya komite sekolah sebagai perwakilan *stakeholders* dan masyarakat. Menurut Keputusan Mendiknas No. 44/u/ 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, menjelaskan bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, sekolah atau non sekolah.

Sebagai pengelola dana yang bersumber dari pihak luar, tuntutan akuntabilitas semakin gencar ditujukan kepada sekolah. Hal ini di dukung pula oleh masih banyaknya kasus - kasus yang mengarah pada indikasi tindak KKN pada lingkungan dunia pendidikan sehingga tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pada dunia sekolah makin besar. Menurut Hamid (2007) ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas adalah:

1. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.

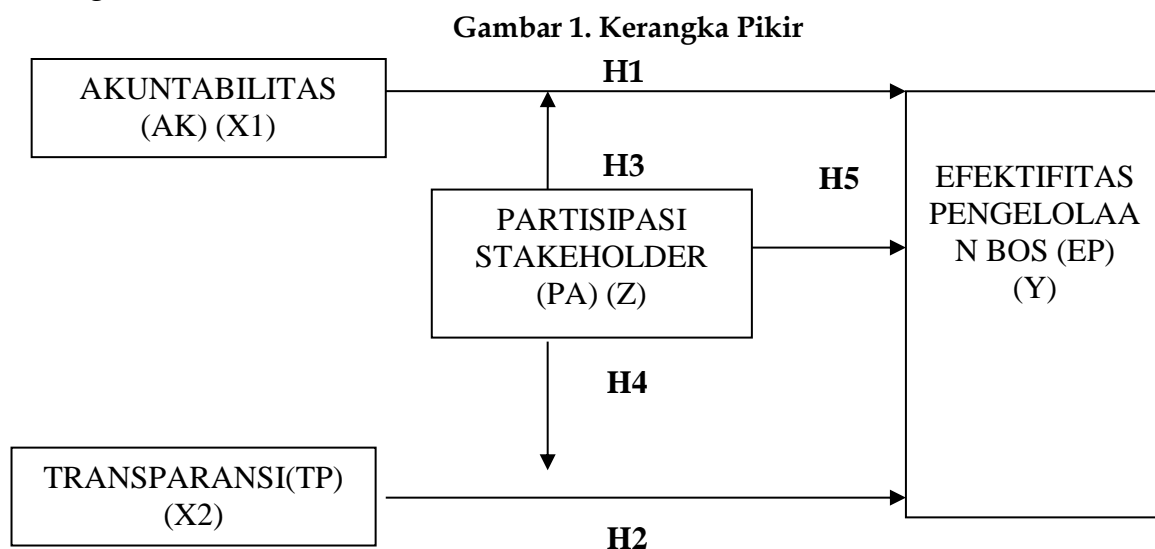
2. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
3. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik / *stakeholders* di awal setiap tahun anggaran.
4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada *stakeholders*.
5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik / *stakeholders* di akhir tahun.
6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
7. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
8. Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Menurut Muhammad (2007) guna mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah
2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3. Meningkatnya kesesuaian kegiatan - kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat
4. Berkurangnya kasus korupsi, kolusi dan nepotise (KKN) di sekolah

### Kerangka Pemikiran Teoritis

Dengan demikian kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat diskemakan sebagai berikut:



## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah stakeholder eksternal dalam hal ini komite sekolah atau orang tua siswa SMA Negeri di Kabupaten Kudus. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh sesuai dengan jumlah anggota komite masing masing sekolah total 54 responden namun yang dapat diolah hanya 48 responden. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif atau jenis penelitian lapangan dengan maksud untuk menguji hipotesis yaitu mengungkap situasi atau variabel sesuai dengan keadaan yang ada pada saat penelitian ini dilaksanakan. Variabel bebas meliputi transparansi dan akuntabilitas. Variabel terikatnya adalah efektivitas pengelolaan dana BOS dan variabel moderasi adalah partisipasi *stakeholders*.

Model regresi moderasi yang digunakan adalah uji interaksi. Uji interaksi atau moderated regression analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) Adapun model regresi linear adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Z + b_4X_1Z + b_5X_2Z + e$$

Dimana :

Y = efektivitas pengelolaan dana BOS (EP)

a = konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = koefisien regresi

$X_1$  = akuntabilitas (AK)

$X_2$  = transparansi (TP)

Z = partisipasi *stakeholders* (PA)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pengolahan data terhadap 14 item pertanyaan menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dapat disimpulkan baik karena memiliki nilai mean atau rata rata sebesar 3,372 yang berada di atas poin 3. Sedangkan untuk transparansi dalam pengelolaan dana BOS yang diungkap dengan delapan item pertanyaan dapat disimpulkan baik karena nilai mean atau rata rata sebesar 3,169 yang berada di atas poin 3. Partisipasi terhadap pengelolaan dana BOS yang diungkap perdasarkan Sembilan item pertanyaan dapat disimpulkan baik karena memiliki nilai mean atau rata rata sebesar 3,391 yang berada di atas 3. efektivitas dalam pengelolaan dana BOS yang diungkap melalui 8 item pertanyaan dapat disimpulkan baik karena nilai mean atau rata rata sebesar 3,573 yang berada di atas poin 3.

Tabel 1. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Regresi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.859 <sup>a</sup>	.738	.707	2.75033	1.648

a. Predictors: (Constant), MODERATE2, AK, PA, TP, MODERATE1

b. Dependent Variable: EP

Sumber: Data primer diolah, 2014.

Berdasarkan perhitungan dan analisis menunjukkan korelasi bersama atau R sebesar 0,859 dengan arah positif. Sedangkan koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,707 atau 70,7%. Hal ini berarti variasi yang terjadi pada efektifitas pengelolaan dana BOS disebabkan karena variasi variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan partisipasi serta transparansi dan partisipasi sebesar 70,7%. Adapun sisanya sebesar 29,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar persamaan.

## Uji F

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil uji F sebagai berikut ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian F Hitung

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	893.966	5	178.793	23.636	.000 <sup>a</sup>
	Residual	317.701	42	7.564		
	Total	1211.667	47			

a. Predictors: (Constant), MODERATE2, AK, PA, TP, MODERATE1

b. Dependent Variable: EP

Sumber: Data primer diolah, 2014.

Berdasarkan hasil uji anova atau F test menghasilkan F hitung sebesar 23,636 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,437. dan probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 dengan demikian model "fit" atau layak untuk digunakan memprediksi variabel dependen. Dengan demikian artinya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, moderasi akuntabilitas dan partisipasi, serta moderasi transparansi dan partisipasi secara bersama - sama berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan dana BOS.

## Uji Hipotesis

*Persamaan Regresi*

Uji hipotesis dari persamaan regresi dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.707	12.396		.218	.828		
AK	1.015	.376	1.872	2.701	.010	.013	76.954
TP	-1.082	.666	-1.244	-1.624	.112	.011	93.892
PA	.319	.394	.387	.809	.423	.027	36.637
MODERATE1	-.025	.012	-2.762	-2.032	.048	.003	295.849
MODERATE2	.041	.020	2.811	2.045	.047	.003	302.732

a. Dependent Variable: EP

Sumber: Data primer diolah, 2014.

Berdasarkan tabel diatas persamaan regresi dapat disusun sebagai berikut:

$$EP = 1,872 AK - 1,244 TP + 0,387 PA - 2,762 AK.PA + 2,811 TP.PA$$

Atas dasar persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa:

- 1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan.
- 2) Transparansi berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan.
- 3) Partisipasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan.
- 4) Interaksi antara akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan.
- 5) Interaksi antara transparansi dan partisipasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan.

**Uji Hipotesis**

Hasil uji signifikansi untuk menjawab hipotesis ditunjukkan pada kolom “t” dan “sig” dengan interpretasi sebagai berikut:

- 1) t hitung untuk akuntabilitas sebesar 2,701 lebih besar dari t tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian signifikan. Atas dasar tersebut maka hipotesa yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan diterima.
- 2) t hitung untuk transparansi sebesar 1,642 lebih kecil dari t tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,112 lebih besar dari 0,05, dengan demikian tidak signifikan. Atas dasar tersebut maka hipotesa yang menyatakan transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan ditolak.
- 3) t hitung untuk partisipasi sebesar 0,809 lebih kecil dari t tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,423 lebih besar dari 0,05, dengan demikian tidak signifikan. Atas dasar tersebut maka hipotesa yang menyatakan partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan ditolak.

- 4)  $t$  hitung untuk interaksi akuntabilitas dan partisipasi sebesar 2,032 lebih besar dari  $t$  tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,048 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian signifikan. Atas dasar tersebut maka hipotesa yang menyatakan partisipasi memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan diterima.
- 5)  $t$  hitung untuk interaksi transparansi dan partisipasi sebesar 2,045 lebih besar dari  $t$  tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,047 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian signifikan. Atas dasar tersebut maka hipotesa yang menyatakan partisipasi memoderasi hubungan antara transparansi terhadap efektivitas pengelolaan diterima

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Perkembangan demokratisasi dan bergulirnya era reformasi membawa berbagai perubahan di masyarakat. Salah satu bentuk perubahan yang paling besar dirasakan adalah meningkatnya kepekaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Masyarakat mengharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel dan efektif sehingga mampu terwujud *good governance* dalam lingkungan dunia pendidikan, sekolah pada khususnya. Adanya indikasi penyalahgunaan dana sehingga alokasi dana yang sudah dikucurkan menjadi kurang efektif membutuhkan adanya partisipasi *stakeholder* guna mendukung pengawasan dalam pengelolaan dana BOS dan termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pendanaan pendidikan. Secara umum, partisipasi akan meningkat jika terdapat unsur kepercayaan terhadap pihak pengelola dana dalam hal ini sekolah. Kepercayaan yang timbul dari setiap *stakeholders* dikarenakan pengelolaan dana BOS yang akuntabel dan transparan pada tiap sekolah.

### ***Pengaruh akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan***

Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan. Hal ini berarti akuntabilitas mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana BOS. Semakin akuntabel maka pengelolaan dana BOS semakin efektif dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Paulus (2009) maupun Anggraini (2013).

### ***Pengaruh transparansi terhadap efektifitas pengelolaan***

Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektifitas pengelolaan dana BOS. Hal ini berarti semakin transparan justru pengelolaan dana BOS semakin tidak efektif, namun penurunannya tidak signifikan (tidak berarti). Hal tersebut dapat terjadi karena dengan semakin transparan sebuah pengelolaan akan memperbanyak pengawasan serta masukan dari pihak lain. Akibatnya pengelolaan akan dilakukan dengan sangat hati-hati sekali. Hal inilah yang menyebabkan pengelolaan tidak efektif karena akan menyita waktu yang

cukup panjang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Erwantosi (2010) dan Pratama (2013).

### ***Pengaruh partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan***

Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan. Hal ini berarti partisipasi mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana BOS namun tidak berarti. Semakin besar partisipasi maka semakin efektif pula pengelolaan dana BOS namun besarnya tidak begitu berarti dan demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Anggraini (2013) dan Pratama (2013).

### ***Partisipasi memoderasi hubungan antara akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan***

Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi terbukti mampu memoderasi hubungan akuntabilitas dan efektivitas secara signifikan. Namun efek moderasi yang diberikan bersifat negatif artinya partisipasi memberikan efek mengurangi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Hal ini karena semakin besar partisipasi berarti semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan. Hal ini akan menyebabkan ketidakefisienan pengelolaan sehingga efektivitas justru melemah. Namun karena partisipasi secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi merupakan variabel moderator murni yang tidak bisa ditempatkan sebagai variabel independen.

### ***Partisipasi memoderasi hubungan antara transparansi dengan efektivitas pengelolaan***

Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi terbukti mampu memoderasi hubungan transparansi dan efektivitas secara signifikan dan berarah positif. Hal ini berarti partisipasi memberikan efek memperkuat pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Namun karena partisipasi secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi merupakan variabel moderator murni yang tidak bisa ditempatkan sebagai variabel independen.

## **SIMPULAN**

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan dengan besarnya  $t$  hitung untuk akuntabilitas sebesar 2,701 lebih besar dari  $t$  tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS diterima.

2. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BBOS yang ditunjukkan  $t$  hitung untuk transparansi sebesar 1,642 lebih kecil dari  $t$  tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,112 lebih besar dari 0,05, dengan demikian tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang menyatakan transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS ditolak.
3. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan dengan besarnya  $t$  hitung untuk partisipasi sebesar 0,809 lebih kecil dari  $t$  tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,423 lebih besar dari 0,05, dengan demikian tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang menyatakan partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan ditolak.
4. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan dengan besarnya  $t$  hitung untuk interaksi akuntabilitas dan partisipasi sebesar 2,032 lebih besar dari  $t$  tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,048 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian signifikan. Sehingga hipotesa yang menyatakan partisipasi memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan diterima.
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan dengan besarnya  $t$  hitung untuk interaksi transparansi dan partisipasi sebesar 2,045 lebih besar dari  $t$  tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 0,047 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian signifikan. Sehingga hipotesa yang menyatakan partisipasi memoderasi hubungan antara transparansi terhadap efektivitas pengelolaan diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Ristya Dwi. 2013. Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pancarkeling VII Surabaya. *Jurnal Transparansi Vol. 1 No. 2 Mei - Agustus 2013*.
- Angka Partisipasi Kasar Pendidikan 2013. Diakses dari <http://www.bps.go.id>.
- Aplia. 2012. Stakeholder dan Produk Jasa Organisasi Pendidikan. Diakses pada 20 Januari 2014 dari <http://aplia08.wordpress.com/2012/03/07/stakeholder-dan-produk-jasa-organisasi-pendidikan/>.
- Arnstein, Sherry. 1969. *A ladder of Citizen Participation*. Journal of The American Institute of Planner.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga: Jakarta.
- Boy, Denny. 2009. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 12 Vol. 14, Agustus 2009*.
- Echwan. 2009. 5 Fakta Penyelewengan Dana BOS Ironi "Sekolah Gratis". Diakses 19 Januari 2014 dari <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/02/5-fakta-penyelewengan-dana-bos-ironi-sekolah-gratis/>.



- Erwantosi. 2010. *Analisis Efektifitas, Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang*. Tesis tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Ghozali dan Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hamid, Muhammad. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Haris, Syamsudin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Press.
- Indriana, St Zulfaidah. 2013. *Efektifitas, Efisiensi dan Produktifitas Manajemen Berbasis Sekolah*. Diakses tanggal 23 Juli 2014 dari <http://zulfaidah-indriana.blogspot.com/2013/05/efektivitas-efisiensi-dan-produktivitas.html>
- Krina, P dan Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Keputusan Mendiknas Nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004.
- Kusno. 2012. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri*. Jurnal Program Magister Administrasi.
- Laporan BPK RI atas Dana BOS dan DPL TA 2007 dan 2008. Diakses tanggal 26 Juli 2013 dari <http://www.bpk.go.id>.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Modami, Detty. 2012. *Efektifitas Penggunaan Dana BOS Pada SMP N 7 Manado*. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Negeri Manado*.
- Peraturan Mendikbud Nomor 76 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 Tentang Standart Biaya Operasi Non Personalialia Tahun 2009.
- Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas. 2013. Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan.
- Paulus, Sugiono. 2009. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik dalam Menyusu Laporan Dana Kampanye Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2009*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.

- Pratama, Fadli Wira. 2013. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS Pada SD di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. *Skripsi tidak dipublikasikan*.
- Rosyada, Dede. 2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siagian, Sondang P. (1978). *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang - Undang Dasar 1945.
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
- Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- , 2009. Buku dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas.
- , 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- , 2013. Efisiensi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan. Diakses 2 Agustus 2014. Dari <http://ifdlali.wordpress.com/2013/06/29/efisiensi-dan-efektivitas-sumber-sumber-pembiayaan-pendidikan/>.
- , 2013. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2013. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemdikbud.
- , 2014. Informasi Penyelewengan Dana BOS. Diakses dari media republika on line tanggal 8 Agustus 2014.
- , 2014. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas Tahun 2014. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemdikbud.